



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
**UNIT KERJA** : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : REZA AFRIZAL
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 630402

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 800.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 191 m<sup>2</sup>/48 m<sup>2</sup> di KOTA PONTIANAK, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 313.000.000

1. MOTOR, YAMAHA SE88 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, YAMAHA B5D A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 14.300.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 10.000.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. 10.000.000

**Sub Total** Rp. 1.147.300.000

**III. HUTANG** Rp. 750.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 397.300.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : MARIA WIJAYANTI  
NIK : 6108014501730005  
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
Unit Kerja : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
Sub Unit Kerja : BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK  
Jabatan : KEPALA BIDANG  
Jenis Laporan : Periodik - 2023  
Tanggal Kirim : 9 Januari 2024

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : USLAN  
NIK : 6171032402710007  
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
Unit Kerja : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
Sub Unit Kerja : BIDANG INFORMASI PUBLIK  
Jabatan : KEPALA BIDANG  
Jenis Laporan : Periodik - 2023  
Tanggal Kirim : 9 Januari 2024

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.